



## Effectiveness of zero Based Waste management Policyin Realizing a Clean Gresik Regency

## Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Dalam Mewujudkan Kabupaten Gresik yang Bersih

Diana Hertati\*, Nurhadi, Tukiman

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

### ABSTRACT

The development of the population in an area and the existence of socio-economic activities will have an impact on increasing the type and amount of waste that will threaten the regional ecosystem. The empirical facts still reflect that waste management is not optimal with the high amount of waste entering the Ngimpik TPST, so that effective waste management is needed in realizing Gresik Regency as a clean city. This study aims to describe the Effectiveness of Waste Management based on "Zero Waste" in Creating a Clean Gresik Regency. This type of research uses a qualitative descriptive approach. Sources of data in this research include primary data and secondary data. Qualitative analysis from Miles and Huberman is used to analyze the data which includes four components, namely: data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the effectiveness of the zero waste-based waste management policy at the Ngimpik TPA is quite effective. Adjustment of needs with waste management innovations that continue to be improved so that problems can be resolved. The main obstacles are the inadequate facilities and infrastructure and the lack of public awareness to reduce waste generation so that waste can be controlled, and the landfill burden will be reduced.

**Keywords:** Policy Effectiveness, waste management, local government

### ABSTRAK

Perkembangan jumlah penduduk di suatu wilayah dan adanya aktivitas sosial ekonomi akan berdampak pada peningkatan jenis dan jumlah sampah yang akan mengancam ekosistem wilayah. Fakta empirisnya masih mencerminkan belum optimalnya dalam pengelolaan sampah dengan masih tingginya sampah yang masuk ke TPST Ngimpik, sehingga diperlukan adanya pengelolaan sampah yang efektif dalam mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai kota yang bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Sampah berdasarkan "Zero Waste" dalam Mewujudkan Kabupaten Gresik Bersih. Sumber data dalam riset ini meliputi data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif dari Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data yang meliputi empat komponen yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil riset ini menghasilkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis zero waste pada TPA Ngimpik sudah cukup efektif. Penyesuaian

### OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Hasniati

Reviewed by:

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni and  
Rutiana Dwi Wahyunengseh

\*Correspondence:

Diana Hertati

diana\_hertati.adneg@upnjatim  
.ac.id

Published: 10 April 2023

Citation:

Hertati, D., et. a. (2023).  
Effectiveness of zero Based  
Waste management Policyin  
Realizing a Clean Gresik  
Regency).

JKMP (Jurnal Kebijakan dan  
Manajemen Publik).

11:1.

doi:10.21070/jkmp.v11i1.1738

kebutuhan dengan inovasi pengelolaan sampah yang terus ditingkatkan sehingga permasalahan bisa teratasi. Kendala utama yang ada mengenai kurang memadainya sarana dan prasarana dan masih kurang kesadaran masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah sehingga sampah dapat terkontrol dan beban TPA akan berkurang.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kebijakan, pengelolaan sampah, pemerintah daerah

## PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah sampah harus diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan efektif agar tidak menjadi ancaman pencemaran lingkungan. Permasalahan kebersihan, Kesehatan dan ramah lingkungan penting untuk dijaga melalui pengelolaan sampah yang baik (Agung et al., 2021). Provinsi Jawa Timur masalah persampahan terus meningkat, dan sulit mencari lahan untuk dijadikan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Berdasarkan data statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2021 pada Provinsi Jawa Timur memproduksi 1,28 juta ton timbulan sampah. Rumah tangga penghasil sampah terbanyak hingga menembus di angka 54,28% dari total sampah. Disusul oleh sampah perdagangan sebanyak 12,65%, dan sampah dari kegiatan kawasan 12,48% (Rizaty, 2022). Pada akhir tahun 2022 ini, sebanyak 47 TPA sampah akan penuh dengan produksi timbulan sampah yang sudah mencapai rata-rata 18.500 ton/hari (Yulipriyanto, 2010). Timbunan sampah Kabupaten Gresik semakin banyak yaitu 187 ton/hari dan hanya memiliki satu unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Ngipik Kecamatan Kebomas dengan luas 6 Hektar are (Ha) ini perlu adanya penanganan pengelolaan sampah secara cepat dan efektif agar tidak terjadi penumpukan (Fathoni, 2018).

Penanganan persoalan sampah bagi pemerintah kabupaten Gresik bukanlah hal yang mudah, karena peningkatan pertumbuhan penduduk simetris dengan hasil produksi sampah baik domestik maupun non domestik (Sekarsari et al., 2020). Manajemen sampah berbasis *zero waste* merupakan kegiatan yang terdiri dari pemisahan, pengomposan dan pengumpulan barang yang layak jual, mempunyai tujuan mengurangi timbulan sampah dari kegiatan sehari-hari manusia (Riali, 2020). Untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di Kabupaten Gresik melalui pengelolaan sampah yang efektif, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

Fakta empiris ditemukan di lapangan, masih mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah karena masih banyaknya sampah yang masuk ke TPA Ngipik sehingga menjadi *overload*. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik namun belum sanggup memerangi permasalahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam mengatasi masalah sampah dengan melakukan pengambilan, penampungan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan membawanya ke TPA. Sistem persampahan nasional harus terintegrasi dalam pengelolaannya agar sampah rumah tangga dapat dikelola dengan baik yang pada akhirnya *overload* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat diatasi (Apriliani & Maesaroh, 2021).

Saat ini Kabupaten Gresik juga menghadapi permasalahan adanya *overload* di TPA Ngipik, satu-satunya tempat pembuangan sampah akhir bagi masyarakat setempat. Guna mengatasi persoalan tersebut maka dilakukan kerjasama antara Kabupaten Gresik, PT Reciki Solusi Indonesia dan Danone-AQUA dalam pengolahan dan pengurangan sampah berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Sampahku tanggung Jawabku (SAMTAKU) dengan volume 200 ton perhari. Nantinya diharapkan dalam pengelolaan sampah tersebut, akan mampu memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi lingkungan yang

akan dipekerjakan untuk melayani pengambilan sampah bagi 25.000 kepala keluarga, Kawasan komersial, perkantoran dan industri di wilayah Kabupaten Gresik.

Kebijakan manajemen sampah dengan Zero Waste melalui TPST 3R di Kabupaten Gresik masih belum efektif (Affandy, 2015). Berdasarkan kelembagaan, masih belum adanya sinergitas dan harmonisasi baik pada dinas, swasta dan masyarakat. Masyarakat dalam berpartisipasi dirasakan masih kurang optimal dan masih bergantung pada pemerintah. Hal ini di *support* hasil penelitian Rendy yang berjudul Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu yang menunjukkan bahwa manajemen sampah masih belum optimal, disebabkan kurang efisiennya pengawasan dari pihak yang terkait, masih rendahnya perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan masyarakat tidak patuh terhadap waktu operasional dalam pembuangan sampah yang sudah ditentukan (Rendy, 2015). Adanya beberapa kriteria kecukupan penampungan sampah ternyata masih belum bisa memecahkan masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pada kenyataannya bahwa keberadaan TPS, TPST dan Bank Sampah hanya menimbulkan bau busuk di lingkungan sekitar wilayah persampahan.

Untuk melihat keberhasilan dari sasaran-sasaran program yang telah dirumuskan, diukur melalui beberapa indikator tingkat efektivitas. Yenik mengemukakan bahwa ada empat parameter efektif atau tidaknya suatu program dari pemerintah daerah meliputi: (1) Terkontrolnya keperluan masyarakat secara implisit, (2) program layanan khusus sebagai kebutuhan masyarakat, (3) kualitas pelayanan sebagai parameter dari kepuasan masyarakat, (4) penyesuaian masalah yang ada terhadap pemberi layanan (Pujowati, 2021). Menurut Campbell Parameter efektivitas program kegiatan terdiri dari : (a) keberhasilan program dan sasaran, (b) kepuasan program, (c) kesesuaian input dan output, (d) tujuan menyeluruh dapat tercapai (Susantri, 2018).

Keefektivan program yang dibuat oleh pemerintah selalu simetris dengan dari tujuan program itu sendiri. Siagian (2001) menyampaikan kriteria untuk mengukur tujuan keefektivan sebagai berikut: (a) Kejelasan tujuan yang dicapai, (b) Kejelasan strategi, (c) Analisis dan perumusan kebijakan (d) Perencanaan harus jelas, (e) Matang dalam penyusunan, (f) Terdukungnya sarana dan prasarana kerja yang memadai, (g) Implementasi yang efektif dan efisien, (h) Sistem kontrol yang mendidik.

Berdasarkan deskripsi dan latar belakang tersebut, riset ini mempunyai tujuan penelitian untuk melakukan analisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis *zero waste* dalam mewujudkan Kabupaten Gresik yang bersih, pendekatan teori yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Campbell dalam (Tristy & Aminah, 2020), efektivitas kebijakan diukur melalui beberapa program dengan parameter, yaitu: 1) keberhasilan program dan sasaran; 2) sosialisasi program; 4) pengawasan program dan mengkaji hambatan dan tantangan.

## METODE PENELITIAN

Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan situs penelitian di Kabupaten Gresik. Unit analisis penelitian ini adalah: kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Gresik, swasta dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis *zero waste* dalam mewujudkan Kabupaten Gresik yang bersih, melalui dua focus, yaitu: mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Sampah Berbasis “Zero Waste” serta hambatan dan tantangan untuk mengatasi persoalan manajemen sampah di Pemerintah Kabupaten Gresik melalui DLH Kabupaten Gresik.

Dalam riset ini, metode yang dilakukan melalui pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, untuk menganalisis kebutuhan peneliti dalam menyusun konsep dan teori format model kolaborasi pemerintahan dalam pengelolaan sampah terpadu. *Focus Group Discussion*: metode untuk menggali data dari berbagai ahli seperti Bupati, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan jajarannya, masyarakat dan Lembaga swasta yang relevan. Data hasil FGD merupakan data pembandingan (*cross check*) dengan hasil wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi dan diterapkan secara berkelanjutan

untuk mendapatkan data yang jenuh. Analisis data dilakukan berdasarkan model dari Miles dan Huberman yang meliputi 4 (empat) komponen, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset Ini akan mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan observasi dan data hasil wawancara hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan fokus pada efektivitas pengelolaan sampah berbasis “*zero waste*” dan hambatan dan tantangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam mengatasi permasalahan sampah melalui beberapa fokus yaitu:

### Efektivitas Keberhasilan Program

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kepala bidang pengelolaan kebersihan dan seksi pengelolaan persampahan sudah melakukan pengawasan seluruh tugas dan fungsi yang ada. Keberhasilan program Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste sudah cukup efektif, hal ini karena pencapaian tujuan belum optimal secara menyeluruh, artinya pencapaian tujuan menyeluruh program pengelolaan sampah berbasis zero waste baru tercapai sebagian saja. Walaupun pemerintah Kabupaten Gresik, PT Reciki Solusi Indonesia dan Danone-AQUA sudah melakukan Kerjasama untuk manajemen dan pengurangan sampah dengan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) 3R Sampahku tanggung Jawabku (SAMTAKU) yang kapasitas volume 200 ton per hari. Anggaran untuk pengelolaan sampah dan limbah beracun dan berbahaya (B3) masih belum memadai sehingga program pengelolaan sampah tidak dapat dijalankan secara optimal. Padahal dalam pelaksanaan seluruh program pengelolaan sampah tersebut memerlukan anggaran yang memadai.

Pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk pelayanan pada bidang pengelolaan sampah dan B3, namun hanya sebatas penjemputan, pengangkutan dan pembuangan tanpa pemisahan jenis sampah pada TPA. Padahal sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 1 telah dijelaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dengan mekanisme pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Selanjutnya sampah tersebut juga harus dipindahkan ke tempat pengelolaan sampah terpadu, dan pada akhirnya akan dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 22I ayat 1 poin 1 sudah diatur dengan jelas bahwa kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah dapat membentuk kelembagaan pengelola sampah, bermitra dengan badan usaha/masyarakat dan bekerjasama baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan dengan pemerintah kabupaten atau kota. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 hasil penelitian memperlihatkan bahwa di Kabupaten Gresik sudah terbentuk 300 Bank Sampah.

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Gresik	66
2	Kebomas	38
3	Manyar	31
4	Cerme	29
5	Menganti	26
6	Bungah	23
7	Driyorejo	20
8	Benjeng	17
9	Sidayu	17
10	Balongpanggang	10
11	Penceng	6
12	Dukun	5
13	Waringinanom	4
14	Duduksampeyan	3
15	Ujung Pangkah	3
16	Kedamean	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>300</b>

Gambar 1. Data Bank Sampah Kabupaten Gresik (Diolah, 2022)

TPA Ngipik sebagai tempat pembuangan sampah akhir bagi penduduk di Gresik dan satu-satunya tempat pembuangan akhir. Daya tampung sampah TPA Ngipik mempunyai kapasitas nilai rata-rata sebesar 524,2 m<sup>3</sup>/hari. Dengan volume sampah yang mengalami peningkatan setiap tahun, maka secara tidak langsung akan menyebabkan daya tampung TPA Ngipik semakin berkurang. Oleh karenanya diperlukan adanya alternatif solusi dalam mengurangi beban volume sampah, salah satunya yaitu dengan konsep *Zero Waste*.

### Efektivitas Keberhasilan Sasaran Program

Dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan sasaran program didasarkan pada Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik yaitu “Terwujudnya kelestarian dan keindahan lingkungan melalui peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup”. Hal ini berarti bahwa sasaran program pengelolaan sampah di Pemerintah Kabupaten Gresik bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah kabupaten tersebut yang bertujuan agar lingkungan terjaga dan tertata dengan rapi dan indah. DLH Kabupaten Gresik telah melakukan tugasnya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, hal ini sesuai dengan ketetapan regulasi yang ada. Namun dari hasil penelitian hanya beberapa kecamatan saja yang sudah melakukan Kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan DLH, hal ini berarti bahwa ketetapan sasaran program belum optimal, karena masyarakat Gresik belum semua ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

### Efektivitas Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik sudah dilaksanakan secara sistematis dan terencana dan dilakukan secara berkala baik satu bulan sekali ataupun triwulan. Sosialisasi program pengelolaan sampah merupakan hal penting untuk dilakukan guna menentukan keberhasilan dan pencapaian program, sehingga diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan aparaturnya kelurahan/desa sebagai pengawas dalam melaksanakan program pengelolaan sampah.

### Efektivitas Pengawasan Program

Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya adalah bagian dari fungsi pengawasan. Kegiatan pengawasan program pengelolaan sampah dilakukan secara internal oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kepala bidang pengelolaan kebersihan dan seksi pengelolaan persampahan dan supervisor yang bertugas mengawasi secara langsung jalannya kegiatan. Pelaksanaannya setelah dilakukannya

program tersebut, sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Pengawasan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk evaluasi keberhasilan program pengelolaan sampah. Sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan atau dengan melihat *report* kegiatan yang dilaporkan secara triwulan. Sedangkan pengawasan oleh kepala bidang dan kepala seksi pengelolaan persampahan, dilakukan dengan mencermati dan mengamati laporan bulanan yang dibuat supervisor bahkan *check on the spot* ke lokasi TPA untuk melihat kebenaran laporan yang diperoleh. Sedangkan pengawasan yang dilakukan supervisor dengan meninjau kinerja pekerja lapangan dan mengumpulkan dan mencatat jumlah sampah yang dikelola setiap harinya, serta menyelesaikan konflik yang terjadi dilapangan, yang biasanya disebabkan oleh kurang adanya jalinan komunikasi yang baik antara petugas dengan masyarakat.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tersebut diatas, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang dikaji dengan 4 fokus yaitu keberhasilan program, ketetapan sasaran program, sosialisasi program, dan pengawasan program, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis *Zero Waste* melalui TPST 3R di Kabupaten Gresik belum berjalan secara efektif. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara bahwa pencapaian target dalam pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pemisahan berdasarkan jenis sampah belum dijalankan, kegiatan pengelolaan sampah oleh DLH belum berjalan efektif baik dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena adanya keterbatasan anggaran.

Sedangkan program pengelolaan sampah masih terdapat hambatan-hambatan sehingga memperlambat jalannya program tersebut, diantaranya adalah Sumber Dana/Anggaran yang tidak memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana serta kurang adanya kesadaran masyarakat sehingga kebijakan pengelolaan sampah berbasis *Zero Waste* melalui TPST 3R di Kabupaten Gresik belum berjalan secara efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dilapangan serta pembahasan, kesimpulannya adalah bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis *zero waste* oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik belum berjalan optimal dalam mewujudkan lingkungan kabupaten Gresik yang bersih berdasarkan fokus 4 fokus yaitu keberhasilan program sudah efektif, ketetapan sasaran program belum efektif, sosialisasi program belum efektif, dan pengawasan program sudah cukup efektif. Hambatan dan tantangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam pengelolaan sampah berbasis *zero waste* adalah terdapat hambatan yang membawa dampak pada lambatnya program yang dijalankan baik dari kurang memadai sumber daya manusia, sarana prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup masih terbatas, diantaranya armada, tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Sedangkan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya koordinasi masyarakat dan lembaga merupakan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

## PENDANAAN

Publikasi artikel ini bersumber dari dana penelitian mandiri LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur, yang mana ini merupakan kegiatan setiap tahun bagi dosen di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yang diharapkan menghasilkan luaran penelitian untuk menunjang kegiatan Indek Kinerja Utama (IKU) dari program MBKM.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada civitas akademika LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, atas dukungannya sehingga artikel ini dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

## REFERENCES

- Affandy, N. A. (2015). Peran Aspek Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Zero Waste (Studi Kasus di Kecamatan Lamongan). *Jurnal Teknik*, 7(2), 745–751.
- Agung, K., Juita, E., & Zuriyani, E. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 6(2), 115–124. <https://doi.org/10.21067/jpig.v6i2.5936>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliani, D., & Maesaroh. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah (Sistem Lapor Sampah). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(1). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i1.29869>.
- Booher, D. E., & Innes, J. E. (2010). Governance for Resilience: CALFED as a complex adaptive network for resource management. *Ecology and Society*. <https://doi.org/10.5751/ES-03404-150335>
- Daka, M. (2020). Collaborative Governance and Community Participation in Solid Waste Management in Lusaka. In *African Journal of Governance and Development*.
- Dardias, K. bayu. (2009). Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik: Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Monograph on Politics and Government. In *polgov UGM (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–84)*. PLOD Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- DeSeve, E. (2007). *Creating Public Value Using Managed Networks. Transforming Public Leadership for the 21st Century*. New York: M.E. Sharpe.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Duan, X., Dai, S., Yang, R., Duan, Z., & Tang, Y. (2020). Environmental collaborative governance degree of government, corporation, and public. *Sustainability (Switzerland)*, 12, 1138. <https://doi.org/10.3390/su12031138>
- Fathoni, M. Z. (2018). Penentuan Lokasi Alternatif Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Menggunakan Quantitative Method. *MATRIK*, 19(1), 9. <https://doi.org/10.30587/matrik.v19i1.574>.
- Ferlianta, W., & Praditya, A. (2018). Kolaborasi Pemerintah Dengan Perusahaan Pertambangan Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Analisis Kebijakan*.
- Gordon, D., McKay, S., Marchildon, G., Sacha Bhatia, R., & Shaw, J. (2020). Collaborative governance for integrated care: Insights from a policy stakeholder dialogue. *International Journal of Integrated Care*. <https://doi.org/10.5334/ijic.4684>
- Johnston, E. W., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. C. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq045>
- Kim, D.-Y. (2014). Transformation of Countervailing Power in Collaborative Governance: A Case Study of the Shi-Hwa Sustainable Development Committee. *The Korean Journal of Public Policy Studies*.
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 (3rd ed.)*. Sage Publications Ltd.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Edition 3. USA: Sage Publications.*
- Morales, H., & Meek, J. (2019). Models of Collaborative Governance: The City of Los Angeles' Foreclosure Registry Program. *Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.3390/admsci9040083>
- Pons-Morera, C., Canós-Darós, L., & Gil-Pechuan, I. (2018). A model of collaborative innovation between local government and tourism operators. *Service Business*. <https://doi.org/10.1007/s11628-017-0341-x>
- Pujowati, Y. (2021). Policy Effectiveness Of Community-Based Waste Management In The City Kediri. *International Journal of Social Science*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i1.31>
- Rendy, M. (2015). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 3(11), 73–79.
- Riali, M. (2020). Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste. *Pondasi*, 25(1), 63. <https://doi.org/10.30659/pondasi.v25i1.13037>
- Rizaty, M. A. (2022). *Ini Daerah Penghasil Sampah Terbanyak di Jawa Timur*. *Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/31/ini-daerah-penghasil-sampah-terbanyak-di-jawa-timur>
- Sekarsari, R. W., Halifah, N., Rahman, T. H., Farida, A. J., Asmara Kandi, M. I., Nurfadilla, E. A., Anwar, M. M., Almu, F. F., Arroji, S. A., Arifaldi, D. F., & Fuadah, Z. (2020). Pemanfaatan Sampah Organik Untuk Pengolahan Kompos. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 200. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6510>
- Sufianti, E. (2011). Perencanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Sugiyono. (2008). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan Research and Development (R&D). In *bandung : alfabeta*.
- Susantri, A. E. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 2(1), 1–11.
- Tampubolon, E. R., & Sri Rahayu, A. Y. (2019). Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat). *Jurnal Inspirasi*. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.57https://doi.org/10.24036/jess/vol2-iss1/52>
- Tristy, M. T., & Aminah, A. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 43–55. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.224>
- Xu, J., Lu, W., Xue, F., Chen, K., Ye, M., Wang, J., & Chen, X. (2018). Cross-boundary collaboration in waste management research: A network analysis. *Environmental Impact Assessment Review*. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.08.005>
- Yulipriyanto. (2010). *Biologi Tanah dan Strategi Pengeloaannya*. Graha Ilmu.

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2023 Diana Hertati, Nurhadi, Tukiman. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.